**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Secara etimilogi kata Desa berasal Bahasa sansekerta, Desa yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang di akui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten dan dari kabupaten ke camat dan langsung ke pemerintahan desa.[[1]](#footnote-1)

Desa dan kelurahan adalah dua satuan pemerintahan terendah dengan status berbeda. Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum. Sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota. Dengan demekian, kelurahan bukan badan hukum melainkan hanya sebagai tempat beroperasinya pelayanan pemerintah dari pemerintah kabupaten/kota di wilayah kelurahan setempat. Sedangkan desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya.[[2]](#footnote-2)

Penduduk desa biasanya terlibat dalam sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan sektor-sektor lainnya yang terkait dengan sumber daya alam di sekitar desa. Desa juga menjadi tempat bagi kehidupan masyarakat yang memiliki kebudayaan, adat istiadat, dan tradisi khas. Di Indonesia, desa memiliki struktur pemerintahan sendiri yang disebut dengan Pemerintahan Desa. Setiap desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang merupakan pemimpin eksekutif di tingkat desa. Pemerintahan desa bertanggung jawab dalam mengurus kepentingan masyarakat desa, seperti pembangunan, infrastruktur, kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya.

Desa juga merupakan unit administratif yang berfungsi dalam administrasi pemerintahan. Dalam administrasi pemerintahan, desa memiliki batas wilayah yang jelas dan memiliki tugas-tugas tertentu dalam pengelolaan administrasi, seperti pencatatan kependudukan, surat menyurat, dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan masyarakat desa. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah untuk memberikan perhatian lebih pada pembangunan dan pemberdayaan desa melalui program-program seperti Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD). Tujuan dari program ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengurangi kesenjangan antara desa dan kota, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat desa.[[3]](#footnote-3)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2024 pasal 1 yang dimaksud dengan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Masyarakat Negara Kesatuan Indonesia. Kepemimpinan merupakan kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau seni mempengaruhi perilaku manusia baik perorangan maupun kelompok. Dan satu hal yang perlu diingat bahwa kepemimpinan tidak harus dibatasi oleh aturan-aturan atau tata krama birokrasi.

Kepemimpinan merupakan suatu wacana yang sangat menarik untuk dikaji secara ilmiah terlebih dikalangan akademisi, dan berbagai hasil penelitian telah banyak melahirkan teori-teori baru dan secara teoritik menjadi acuan ilmiah yang dapat diterapkan dan diaplikasikan kedalam berbagai wadah organisasi, baik organisasi politik, sosial, keagamaan dan organisasi pendidikan.[[4]](#footnote-4) Menurut PERMENDAGRI Nomor 84 Tahun 2015 Pasal 6 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa menyebutkan bahwa Tugas dan Fungsi Kepala Desa adalah Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk mencapai pelayanan yang baik dan berkualitas pada masyarakat diharapkan Kepemimpinan Kepala Desa Bongkot Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang harus menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan optimal. Di mana menurut Kepemimpinan “seseorang dapat dilihat dan dinilai dari beberapa” indikator seperti; Kemampuan Mengambil Keputusan, Kemampuan Memotivasi, Kemampuan Komunikasi, Kemampuan Mengendalikan Bawahan, Tanggung Jawab dan Kemampuan Mengendalikan Emosional. Kepemimpinan yang baik juga berfungsi untuk membangun kepercayaan dan kerjasama antara Kepala Desa dan Masyarakat, yang ada gilirannya dapat meningkatkan kualitas Pelayanan Publik. Pentingnya Gaya Kepemimpinan yang demokrasi dan responsif dalam konteks ini dapat menjadi kunci untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan kualitas pelayanan yang di berikan.[[5]](#footnote-5)

Pelayanan Publik merupakan pelayanan dasar dalam penyelenggaran pemerintah desa. Pelayanan publik merupakan hal penting dalam penilaian kerja pemerintah desa, baik tingkat pusat atau daerah. Penyelenggaraan pemerintah desa dikatakan baik jika pelayanan publik yang dilakukan memberikan kepuasaan bagi masyarakat. Kepuasan masyarakat itulah yang menjadi tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintah desa dengan pelayanan publik yang diberikan.[[6]](#footnote-6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dalam Pasal 1 Ayat 1 bahwa pelayanan publik adalah Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa atau pelayanan Administrasi yang disediakan oleh penyelenggaraan publik. Kemudian dipertegas dalam Ayat 7 bahwa standar Pelayanan adalah Tolak Ukur yang digunkan sebgai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggaraan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan teratur. Masyarakat sebagai penerima pelayanan sangat menginginkan pelayanan yang cepat, mudah, murah dan dapat terjangkau oleh semua kalangan. Oleh karena itu pemerintahan desa harus dapat memberikan pelayanan yang berkualitas pada Kantor Desa Bongkot yang memberikan pelayanan publik khususnya kepada masyarakat Desa Bongkot. Untuk meningkatkan kepuasaan dan loyalitas masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif dalam proses pelayanan publik yang lebih baik dan efektif.[[7]](#footnote-7)

Dari sinilah tuntutan Kepemimpinan seorang Kepala Desa dalam mengelola pelayanan publik agar lebih baik dalam menjalalankan tugas dan tanggungjawab demi menciptakan pelayanan masyarakat yang baik dan berkualitas untuk mencapai kepuasan masyarakat khususnya di Desa Bongkot Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul; Analisa Pengaruh Kepimpinan Kepala Desa Terhadap Pelayanan Publik Di Desa Bongkot Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009.

1. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat **kualitas pelayanan publik** di Desa Bongkot?
2. Bagaimana karakteristik **kepemimpinan Kepala Desa Bongkot** saat ini?
3. Bagaimana **kualitas pelaksanaan kepemimpinan Kepala Desa terkait kualitas pelayanan publik di Desa Bongkot, jika dilihat dari** Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009?
4. **Tujuan Penelitian**
5. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kepimimpinan Kepala Desa terhadap kualitas pelayanan publik di Desa Bongkot.
6. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kepimimpinan Kepala Desa terhadap kualitas pelayanan publik di Desa Bongkot.
7. Untuk mengetahui kendala apa yang ditemukan dalam pelayanan publik.
8. **Manfaat Penelitian**

Setiap dilakukannya suatu penelitian hendaknya mempunyai manfaat yang akan dicapai baik secara teoretis maupun praktis. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti, Penelitan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, mengembangkan wawasan dan pengalaman nyata dalam bidang ilmu tentang pelayanan publik di dalam pemerintahan desa.
2. Bagi Aparat Pemerintah Desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan kepada Aparat Pemerintah Desa terutama Kepala Desa guna meningkatkan kualitas kerja sehingga tercipta pelayanan publik yang baik yang ditandai dengan adanya kepuasan masyarakat yang dilayani.
3. Bagi akademisi, penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya disamping sebagai sarana untuk menambah wawasan.
4. **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris. Jenis penelitian empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang di ambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.[[8]](#footnote-8) Pada metode penelitian penulis membagi dalam beberapa pembahasan, yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data dan teknik pengumpulan data, yang penjelasan sebagai berikut :

**1.5.1 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati, data dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.[[9]](#footnote-9)

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data-data dengan metode wawancara, kemudian hasil pengumpulan data yang didapat jelas dan detail tersebut dideskripsikan bagimana menggambarkan atau menjelaskan mengenai tentang Analisa Pengaruh Kepimpinan Kepala Desa Terhadap Pelayanan Publik di Desa Bongkot.

**1.5.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di kantor kelurahan yang terletak di Desa Bongkot Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang. Dengan Kepala Desa tersebut penulis akan melakukan observasi terlebih dahulu yang kemudian dilanjutkan wawancara yang mendalam dan secara langsung, serta dengan tujuan mendaptkan dokumentasi ataupun data-data yang akan menjadi alat pendukung untuk keberlanjutan dari penelitian ini, serta informasi-informasi yang dibutuhkan. Dalam hal ini, penulis juga akan melakukan wawancara langsung kepada beberapa masyarakat yang ada di desa tersebut. Alasan penulis melakukan penelitian di Desa Bongkot karena fenomena-fenomena yang menyangkut tentang kepimimpinan kepala desa dan pelayanan publik di desa tersebut.

**1.5.3 Sumber Data**

Sumber data merupakan faktor penentu keberhasilan penelitian karena sumber data merupakan informasi yang paling dibutuhkan dalam hasil penelitian. Sumber data yang dapat dipakai ada 2 (dua), yaitu sumber data primer dan data sekunder.

1. Data Primer Kualitatif

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung peneliti dari sumber data tersebut tanpa adanya perantara. Data primer ini dapat berupa opini dari subjek (orang) baik secara individual atau kelompok, hasil observasi suatu benda (fisik), kajian atau kegiatan serta hasil pengujian. [[10]](#footnote-10)Adapun proses pengumpulan data atau informasi dapat diperoleh dari kepala desa, staf desa dan masyarakat di desa bongkot dengan cara peneliti melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Sedangkan teknik pengambilan sampel sumber data untuk penelitian, peneliti memiliki beberapa orang tertentu yang dipertimbangkan dapat memberikan data yang diperlukan oleh peneliti yang kemudian berdasarkan data atau informasi dari sampel tersebut peneliti dapat menentukan sampel lain yang dipertimbangkan dapat memberikan data yang lebih lengkap.[[11]](#footnote-11)

1. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh dari peneliti sendiri dengan cara tidak langsung, tetapi dengan cara media perantara (didapat dan dicatat oleh pihak lain ataupun orang lain). Dalam penelitian ini data sekunder biasanya berupa bukti, catatan atau laporan yang sudah tertata dalam bentuk arsip (data dokumen) yang disebarluaskan.[[12]](#footnote-12) Data sekunder ini dijadikan data pendukung oleh peneliti.

**1.5.4 Teknik Pengumpulan Data**

Agar dapat memperoleh data yang akurat terkait subjek yang akan diteliti, maka dalam suatu penelitian diperlukan sebuah teknik pengumpulan data yang baik dari bahan hukum primer dan sekunder. Dalam hal ini dibutuhkan berbagai alat pengumpulan data seperti teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Teknik Observasi

Teknik observasi adalah “pengamatan dan pencatatan sesuai dengan sistematik fenomena-fenomena yang diselidiki”.[[13]](#footnote-13) Teknik observasi dapat juga diartikan sebagai suatu cara menganalisis serta mencatat informasi secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat serta mengamati objek atau permasalahan secara langsung di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti mengadakan pengamatan lapangan, setelah itu peneliti mengamati fenomena yang terjadi kemudian mencatat langsung fenomena yang terjadi. Adapun teknik observasi dilakukan oleh peneliti dengan melihat, mengenai, dan mengamati secara langsung bagaimana analisa pengaruh kepimimpinan kepala desa dan pelayanan publik di desa bongkot tersebut.

1. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dengan mengajukan secara lisan sejumlah pertanyaan untuk dijawab seseorang secara lisan pula. Wawancara juga dapat diartikaan sebagai percakapan yang dilakukan yang memiliki tujuan untuk mengkontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, dan lain sebagainya. Yang dilakukan secara bertatap muka antara pewawancara dengan orang-orang diwawancari agar menemukan informasi yang konkrit berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.[[14]](#footnote-14) Adapun wawancara yang menjadi informasi dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu kepala desa dan masyarakat. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan.

1. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi cara yang dilakukan untuk mengumpulakan data sehingga dapat menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah diteliti, sehingga memperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang telah tersediah dalam catatan dokumen. [[15]](#footnote-15)Adapun dokumentasi dalam penelitian ini yaitu dengan meminta data-data dari pihak desa seperti bentuk tulisan dan bentuk gambar. Agar mendukung penelitian.

**1.5.5 Pengolahan dan Analisa Data**

Penelitian dalam mengganalisa menggunakan metode kualitatif, analisa data dimulai dengan melakukan wawancara mendalam dengan infroman yaitu seseorang benar-benar memahami dan mengetahui situasi objek penelitian. Setelah melakukan wawancara, analisa data dimulai dengan membuat transkip hasil wawancara dengan memutar kembali rekaman hasil wawancara, mendengarkan dengan seksama dan menulisa kata-kata yang didengar sesuai apa yang ada di rekaman tersebut. Setelah peneliti menulis hasil wawancara tersebut kedalam transkip, selanjutnya peneliti harus cermat untuk melakukan reduksi data. Dengan mengambil dan mencatat informasi yang sesuai konteks penelitian.

1. Bintaro, R. (2008), *Desa-kota,* PT Raja Grafindo Persada, h. 11. [↑](#footnote-ref-1)
2. Jeddawi, M., Rahman, A., & Nawawi, M. (2018). Studi Kemungkinan Perubahan Status Desa Teluk Kapuas Menjadi Kelurahan di Kabupaten Kubu Raya*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa,* h. 1-2. [↑](#footnote-ref-2)
3. Siti, M. (2024). *Pengertian desa menurut para ahli, Ciri-ciri, Fungsi dan Jenisnya.* Gramedia Blog. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-desa/>, [↑](#footnote-ref-3)
4. Syaroh, M., Jamrizal, & Hakim, L. (2023). Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi Pendidikan (Kepemimpinan Dalam Pendidikan*)*. COMSERVA: *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*. 3(3), h. 1189- 1200. [↑](#footnote-ref-4)
5. Krisjuyani, S. (2022). Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan Desa. *FOKUS: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 1(1), h. 2. [↑](#footnote-ref-5)
6. Siana, N. M. (2017). Tolok Ukur Kualitas Pelayanan Publik*. Jurnal Paradigma Madani*, 4(2), h. 75-80. [↑](#footnote-ref-6)
7. Pamungkas, T. K., & Jakfar, M. H. A. (2022). Efektivitas kinerja pemerintah desa dalam pelayanan publik. *Jurnal Paradigma Madani*, 9(1), h. 13-24. [↑](#footnote-ref-7)
8. Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 280. [↑](#footnote-ref-8)
9. Meleong, l. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, h. 3. [↑](#footnote-ref-9)
10. Purhantara, W. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yokyakarta: Graha Ilmu, h. 79. [↑](#footnote-ref-10)
11. Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, h. 41. [↑](#footnote-ref-11)
12. Ali Mohammad. (2012). *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*. Bandung: Angkasa, h. 80. [↑](#footnote-ref-12)
13. Sutrisno hadi. (2002). *Metodologi Research*, Yogyakarta: andi offset, h. 136. [↑](#footnote-ref-13)
14. Burhan Bungin. (2015). *Metodologi penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontempore*r, (Cet. X), Jakarta: Rajawali Pers, h. 155. [↑](#footnote-ref-14)
15. Basrowi dan Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta, h. 158. [↑](#footnote-ref-15)